



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KALURAHAN
(LPPKal)
KALURAHAN TIMBULHARJO
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KALURAHAN
TIMBULHARJO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦠꦶꦩꦧꦸꦭꦲꦂꦗꦺ

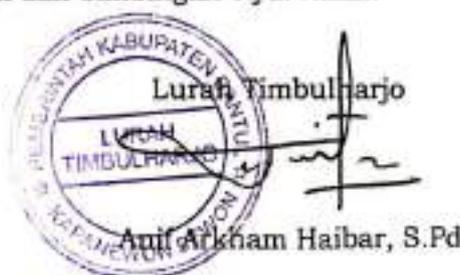
03
KED. TEMBUNG

KALURAHAN



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi "Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran". Kami sadari sepenuhnya, bahwa dengan dukungan dari segenap komponen yang ada di Kalurahan Timbulharjo, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 2023 sesuai realisasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dengan memperhatikan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak, sehingga proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Akhir Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Timbulharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya. Amin.


Lurah Timbulharjo
Anif Arkham Haibar, S.Pd

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN (LPPKa)

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan bahwa kewenangan Kalurahan meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Kalurahan.

Lurah berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa bahwa "Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepala bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran". Oleh karenanya, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi laporan semua kegiatan Kalurahan berdasarkan kewenangan Kalurahan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dalam jabatan Lurah.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dalam rangka melaksanakan amanat tersebut Pemerintah Kalurahan Timbulharjo telah menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

(LKPPKal) Tahun 2023 yang merupakan informasi: capaian kinerja atas pelaksanaan program kegiatan, baik keberhasilan maupun kendala dan solusi pemecahannya serta sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, namun demikian setidaknya pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran atas pelaksanaan program kegiatan yang berupa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Timbulharjo. Semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas kinerja dan peningkatannya dimasa yang akan datang.

B. VISI MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN

1) Visi

Visi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan atau yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi Lurah Kalurahan Timbulharjo untuk enam tahun mendatang (2021 - 2026) adalah ***Terwujudnya Desa Timbulharjo ADEM (Aman Damai Eksis Makmur)***.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pemerintah Kalurahan Timbulharjo berkeinginan mewujudkan kehidupan kalurahan yang aman dan damai sebagai pengejawantahan suasana kalurahan yang asri. Adapun eksis merupakan pengejawantahan dari hadirnya pelayanan pemerintah yang bersih, transparan dan bertanggung jawab sehingga dapat dipastikan pelayanan kalurahan sampai tingkat akar rumput dapat berkonsep desa membangun. Makmur sebagai kata penutup merupakan harapan dari upaya-upaya sebelumnya, masyarakat adil dan makmur dalam berkehidupan di kalurahan tempat kelahirannya.

2) Misi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah Kalurahan yang diwujudkan dalam kegiatan ataupun pelayanan dan merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

BAB II
PROGRAM KERJA

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN

Adapun jenis penyelenggaraan pemerintah Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya Atas Jumlah
1	2	3	4
1	Peraturan Perundangan undangan	a. Peraturan Kalurahan	7
		b. Peraturan bersama Lurah	-
		c. Peraturan Kepala Kalurahan	5
		d. Keputusan Kepala Kalurahan	62
2	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk	
		1) Laki-laki	11.705 jiwa
		2) Perempuan	11.549 jiwa
		3) Jumlah Kepala Keluarga	8.244 jiwa
		4) Jumlah Jiwa	23.254 jiwa
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Lulusan Pendidikan Umum	
		a) Taman Kanak-Kanak	1.699 orang
		b) Sekolah Dasar/ sederajat	4.212 orang
		c) SMP	3.518 orang
		d) SMU/SMA	7.253 orang
		e) Akademi/ D1-D3	724 orang
		f) Sarjana	2.235 orang
		g) Pascasarjana	S2: 229 orang S3: 5 orang
2) Lulusan Pendidikan Khusus			
a) Pondok Pesantren	- orang		

		b) Pendidikan Keagamaan	- orang
		c) Sekolah Luar Biasa	- orang
		d) Kursus Keterampilan	- orang
		3) Tidak Lulus/Tidak Sekolah	- orang
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	
		1) Karyawan	
		a) Pegawai Negeri Sipil	665 orang
		b) TNI/Polri	171 orang
		c) Swasta	2.588 orang
		d) Wiraswasta/Pedagang	3.025 orang
		e) Petani	49 orang
		f) Tukang	148 orang
		g) Buruh Tani	2.798 orang
		h) Pensiunan	347 orang
		i) Nelayan	2 orang
		j) Peternak	4 orang
		k) Jasa	120 orang
		l) Pekerja seni	33 orang
		m) Lainnya	5.127 orang
		n) Tidak bekerja/Penganggur	9.515 orang
3	Pertanahan	a. Jumlah tanah yang bersertifikat	8.788 buah
		b. Luas tanah kas Kalurahan	102,00 Ha
4	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah aparat Pemerintahan Kalurahan	38 orang
		b. Jumlah Anggota BPD	9 orang
5	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip	
		- Jumlah anggota	14 orang
		- Jumlah pos kamling	48 pos
		- Jumlah Operasi Penertiban	3 kali
		b. Ketentraman dan Ketertiban	

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Secara umum realisasi keseluruhan progam kegiatan disemua bidang kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Timbulharjo pada Tahun Anggaran 2023 sudah baik yaitu mencapai 94,25 %.
- Urgensi dari hasil evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Timbulharjo TA.2023 adalah dibutuhkannya peningkatan partisipasi masyarakat pada khususnya dan pihak-pihak terkait lainnya pada umumnya.
- Berdasarkan pada data yang telah disebutkan dalam laporan ini, perlu semangat yang lebih untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang. Tujuan utamanya untuk mewujudkan visi terwujudnya pemerintahan yang bersih, adil dan bertanggungjawab, menuju masyarakat yang agamis, mandiri dan sejahtera, serta terciptanya lingkungan hidup yang hijau, asri dan sehat.
- Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan diperlukan fungsionalisasi yang mantap lembaga- lembaga di Kalurahan seperti: Bamuskal, LPMKal, RT, PKK, TPK, Gapoktan, Dewan Kesenian, Dewan Olah Raga dan sebagainya untuk bersama - sama dengan tokoh masyarakat maupun ulama dalam menciptakan kemajuan Kalurahan Timbulharjo.
- Perlu adanya pembinaan dari instansi yang ada di tingkat lebih atas yaitu kapanewon, dinas/ instansi terkait dan atau narasumber- narasumber ahli lainnya.
- Perlunya kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pamong Kalurahan, Staf dan pihak-pihak yang berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Timbulharjo dalam

meningkatkan pelayanan, memberdayakan diri dan lingkungannya serta memberdayakan masyarakat Kalurahan.

- Penertiban administrasi dalam segala kegiatan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang ada di Kalurahan Timbulharjo.
- Berdasarkan Data Realisasi Bidang Pembangunan diatas, secara umum Kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Timbulharjo pada TA.2023 mengalami Peningkatan dibandingkan sebelumnya atau TA.2022.

SARAN

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggaran 2023 ini, kami sadari masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman yang kami miliki. Untuk itu kami tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif, serta petunjuk/ arahan lebih lanjut.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) ini sebagai gambaran pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan dalam tahun anggaran 2023. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan atas pelaksanaan otonomi Kalurahan dan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat.

Semoga segala bentuk harapan dan strategi arah Pembangunan Kalurahan Timbulharjo ini dapat menjadikan Pemerataan dalam membangun manusia dan membangun sarana prasarana aktifitas sosial, ekonomi sehingga diharapkan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata menuju kesejahteraan bagi seluruh komponen Kalurahan Timbulharjo.

Tidak lupa Kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Bamuskal Timbulharjo yang telah bermusyawarah dan bekerja sama selama ini. Semoga apa yang telah kita gagas dan laksanakan akan membawa Kalurahan Timbulharjo ke arah kemajuan di masa yang akan datang, seiring dengan peningkatan aspek kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat Kalurahan Timbulharjo. Tiada gading yang tak retak.

Begitu pula dengan segenap aparat Kalurahan dalam melaksanakan tugas, tentu tak lepas dari kesalahan maupun kekurangan. Saran dan kritik kami harap dengan semangat kebersamaan untuk perbaikan dan penyempurnaan bagi langkah di masa yang akan datang.

Ditetapkan di : TIMBULHARJO

Pada Tanggal : 25 Maret 2024


LURAH TIMBULHARJO
Anif Arkham Haibar, S.Pd